BAB IV

ANALISA DATA

A. Pandangan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan Masyarakat Mengenai Reklamasi Teluk Lamong di Peisisir Kota Surabaya

Analisis data dimaksud untuk memberi makna atau menjelaskan temuan data sesuai dengan tujuan penelitian. Juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenarannya, dalam hal ini merupakan tahap akhir untuk menggabungkan hasil temuan data dengan teori. Pada tahap analisis ini penulis bertujuan untuk memperoleh deskripsi, serta mengkonfirmaikan dengan teori yang telah peneliti pilih, yakni teori Kebijakan Reklamasi, Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana, *Renaisans* Kota, *Green Thought*, *Green Deen*, dan Konflik.

Peneliti menggunakan metode kualitataif jenis deskriptif dalam melihat masyarakat telah dimanfaatkan Teluk Lamong Surabaya dan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di sekitar pesisir kota Surabaya mengalami banyak tantangan atau problematika kehidupan yang telah dihadapinya. Setelah peneliti menyajikan data-data dalam penyajian dan menjawab segala masalah yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, maka dalam analisis data ini akan dipaparkan beberapa hasil temuan peneliti di lapangan dan

sekaligus analisisnya. Adapun temuan-temuan data dapat dilihat pada Tabel.

4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Temuan Analisa Data

No.	Temuan	Hasil Analisa
1.	Sejarah Teluk Lamong,	a) Pengerukan lahan petani tambak dan
	Mega Proyek	pelabuhan berkonsep ramah
	Transinternasional	lingkungan "Green Port".
	berupa pembangunan	b) Menjual lahan tambak karena
	pelabuhan Teluk	kebutuhan hidup, dengan peroleh
	Lamong di Surabaya	harga jual yang sangat tinggi dan
4	Bertaraf Internasional	menguntungkan.
		c) Adanya konflik terhadap sosial yang
		dikarenakan dampak pembangunan
		dan mengurangi penghasilan nelayan
		dan petani di sebabkan ekosistem dan
		air laut mulai rusak dan berakhir
		banjir.
		d) Sikap pesimis akan dibangunnya
		pelabuhan karena merusak habitat
		(laut/air) dan pada masyarakat
		sekitar.

		e) Tidak membawa dampak positif bagi
		masyarakat pesisir, justru dampak
		negatif lebih dominan seperti banjir
		musiman.
		f) Emosi/sikap tidak setuju warga atas
		pembangunan Teluk Lamong karena
		kwatir dampak yang tidak terduga
		seperti penghasilan berkurang dan
		dampak banjir ke kampung.
		g) Lebih banyak beraktivitas berupa
		konservasi daripada reklamasi luat
		secacara terus-menerus.
		h) Mempengaruhi penghasilan nelayan
		disekitar, sehingga mengalami
		penurunan.
2.	Reklamasi Teluk	a) Proses pembangunan reklamasi
	Lamong	merusak lahan (pantai) disekitar
		Teluk Lamong.
		b) Kompensasi menjadikan
		pengangguran dan ketergantungan.
		c) Kerusakan dan keseimbangan laut
		terganggu, banjir musiman
		d) Berdampak pada kelangsungan

		hidup manusia. Berupa kerusakan
		pantai dan Banjir.
		e) Penghasilan nelayan turun.
3	Upaya Penyelamatan	a) Tanggap darurat di saat nelayan
	Ruang Hidup Nelayan	terkena bencana banjir
	Pesisir	b) Membentuk perekonomian "koperasi
		Nelayan" Soko guru unit usaha
		berupa perikanan tangkap dan
		pembudidaya lahan.
		c) Membangun penguatan kemandirian
		ekonomi nelayan perempuan dan
		Pembudidaya ikan. Melakukan
		advokasi dan pendampingan
		terhadap masyarakat yang
		terdampak. Mengadakan dialog
		Publik tentang ketangguhan nelayan
		terhadap dampak perubahan iklim.
		Merekrut nelayan dengan membuka
		UKM Jurnalistik, diadakan lomba
		desain penataan pesisir.

(Sumber : Observasi Lapangan, 2016)

Dari data Tabel 4.1 dapat peneliti analisis dengan menggunakan teori Kebijakan Reklamasi, Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Renaisans Kota, Green Thought, Green Deen dan konflik tentang membangun proyek reklamasi dalam ramah lingkungan. Dengan menggabungkan 5 (lima) pendekatan teori tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan secara sempurna tentang pandangan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan masyarakat mengenai adanya pembangunan reklamasi Teluk Lamong di Surabaya.

Adapun Bentuk-bentuk konfik masyarakat nelayan di pesisir kota Surabaya yaitu :

1. Konflik berbentuk aksi penolakan

Menurut KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), salah satu konfik yang sering terjadi berawal dari proses perselisihan disebabkan oleh investor PT. Pelindo III, awalnya sepakat melakukan akad jual beli tambak yang bersebelahan di pesisir kota Surabaya dengan harga jual yang cukup tinggi. Ternyata masyarakat hanya menerima uang yang tidak sebanding dengan luas tanahnya. Sehingga pemilik tambak merasa dirugikan. Selain itu, peristiwa aksi penolakan di Teluk Lamong beberapa kali terjadi. Mulai dari kalangan aktivis, komunitas nelayan salah satunya yaitu KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), para nelayan di laut Tambak Osowilangun, nelayan di laut Rumokalisari, nelayan di laut Branjangan, nelayan di laut Kalianak, nelayan di laut Kenjeran, nelayan perempuan serta masyarakat yang terkena dampak di pesisir Kota Surabaya. Kemudian kaum kapitalis PT. Pelindo III juga melakukan bentuk penyuapan

terhadap proletar, yang mana pertama kaum kapitalis memberikan kompensasi berupa sembako tetapi masyarakat menolak jika hanya di beri sembako, disisi lain kaum kapitalis berusaha supaya kaum proletar, tidak terus-menerus melakukan aksi penolakan harus disegerakan melakukan penghentian penggalian pasir tersebut karena akan mengurangi hasil pendapatan para nelayan, dan terjadi kerusakan tanah. Maka terjadilah bentuk penyuapan yang kedua berupa uang melalui kaum borjuis kecil yakni ada lembaga atau aparat kelurahan di berikan oleh kaum kapital berupa uang senilai Rp. 160.000 perorang, disinilah kemudian muncul kembali gesekan konflik antara kaum proletar, nelayan dengan borjuis kecil lembaga, karena nelayan dan masyarakat sekitar diberi kompensasi oleh lembaga hanya senilai Rp. 100.000 perorang.

2. Tidak adanya keterbukaan

Tidak adanya keterbukaan pengusaha penggalian pasir dan pemerintah kelurahan dan pemerintah kota Surabaya, disebabkan oleh adanya pihak-pihak atau aparat kelurahan yang diuntungkan. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh investor PT. Pelindo III di Teluk Lamong. Kondisi masyarakat pesisir kota Surabaya menjadi tidak stabil. Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Teluk Lamong dengan masyarakat nelayan di pesisir Kota Surabaya, sebagai berikut:

a. Pemerintah Kelurahan Kurang tegas

Pendapat anggota KNTI (Kesatuan Nelayan Indonesia) mengenai reklamasi teluk lamong di pesisir Kota Surabaya ini selain terjadi bentuk penyuapan antara PT. Pelindo III dengan Masyarakat, pemerintah provinsi tidak menindaklanjuti pertangungjawaban atas pemulihan terhadap para nelayan yang terdampak. Dari dampak ekonomi, bahan bakar minyak (BBM) sudah naik otomatis berdampak bagi kaum proletar. Pendapatan nelayan diperkirakan akan turun 30% untuk menutupi kebutuhan hidup. Dengan begitu akan ada pemangkasan pendapatan untuk membeli bahan bakar. Kaum borjuis PT. Pelindo III dan pemerintah kota Surabaya tidak pernah mengantisipasi dampak kenaikan BBM di kampung nelayan. Sama seperti sebelumnya, kenaikan BBM sebesar Rp.2000, hal ini akan mendongkrak kenaikan harga di pasaran Rp.2500-5.500 per liternya dikampung nelayan. Di lapangan, kenaikan harga beli BBM jenis solar di kampung nelayan dan petambak bervariasi. Di Surabaya sekitarnya harga solar (Rp.8000). Selain itu, tidak ada bentuk pertangungjawaban oleh kelurahan hanya dari dinas, itupun bersifat sementara yakni memberikan kompensasi berupa jaring ikan kepada nelayan lewat lembaga tetapi malah disalahgunakan oleh lembaga tidak memberikan kepada nelayan

Dari hasil temuan, peneliti menemukan ada gesekan antara kaum kapitalis pemilik modal yakni investor Teluk Lamong, borjuis kecil pemerintah kota dan kelurahan dengan kaum proletar, masyarakat nelayan. Bahwa investor dan pemerintah kota belum melakukan sosialisasi kepada masyarat akan adanya pelabuhan bongkar muat baru di Teluk Lamong Tambak Osowilangun Surabaya. Sehingga kaum proletar, merasa kecewa karena yang lebih menguntungkan adalah kaum pemilik modal PT. Pelindo III. Dengan adanya kebijakan kaum borjuis maka kaum proletarlah yang akan merasakan dampaknya, membuat nelayan memilih mengurangi aktifitas melaut. Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai, sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu, tanah mengalamai erosi akibat pembangunan proyek Teluk Lamong. Kurang tegasnya Pemerintah Kelurahan dalam menanggapi keluhan warga yang meminta ganti rugi dan harus disegerakan melakukan penutupan usaha penggalian Teluk Lamong di Tambak Osowilangun. belum sepenuhnya memperhatikan ramah lingkungan dan perekonomian nelayan di pesisir kota Surabaya.

Sikap ketidak tegasan pemerintah Kelurahan bila meminjam pandangan Ibrahim Abdul Matin (2010), ia mengatakan :

My own Green Deen and meeting other Green Muslims who are living the six principles of a Green Deen. I sought out Muslims who are committed to being stewards of the Earth (khalifah), who understand the Oneness of God and His creation (tawhid), who look for signs of Allah (ayat) in everything around them, who move toward justice (adl), who seek to protect the delicate balance of the natural world (mizan), and who honor our sacred trust with God to protect the planet (amana). Happily, what I discovered is that Muslims are involved in every aspect of the stewardship of the Earth. ⁶⁶

.

⁶⁶ Ibrahim Abdul Matin, *Green Deen*. (Sanfrasisco California: Berrett-Koehler Publishers, Inc.), 46.

Artinya, bahwa menjadi seorang muslim hijau dan menegakkan agama hijau, Matin mencoba memberikan pegangan kepada masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, ada 6 (enam) prinsip yang seharusnya dijalankan dan dipegang oleh Muslim untuk bertekad menjadi khalifah di muka bumi. Enam itu diantaranya: Bagaimana memahami kesatuan Tuhan dan ciptaanya (tawhid), bagaimana mencari ayat-ayat Allah dalam segala sesuatu di sekitar mereka, memperjuangkan keadilan ('adl), berusaha menjaga keseimbangan dinia (mizan), menghormati perjanjian suci manusia dengan Tuhan (amanah) untuk melindungi pelanet ini. Dan membahagiakan, banyak muslim yang terlibatdalam setiap aspek pelestarian lingkungan.

Maka, cara tidak langsung kinerja pemimpin yang tidak peka dalam memperhatikan banyak aspek termasuk problem yang dihadapi masyarakat nelayan disekitar areal lokasi Teluk Lamong, ini merupakan tanda-tanda pemimpin yang belum amanah, apalagi selalu mengedepankan konsep mizan "keseimbangan" dalam pelestarian lingkungan.

Pengusaha Penggalian Teluk Lamong Melanggar Kesepakaan
 Warga

Kaum kapitalis merupakan orang yang mempunyai modal untuk biaya produksi dalam suatu perusahaan. Dengan merasa mampu, golongan kapitalis berbuat sesuka hati untuk memenuhi kemauannya. Kaum kapitalis sering kali menindas kaum proletar. Dengan cara melakukan resolusi konflik akan bisa membebaskan diri dari sistem kapitalis. Sehingga masyarakat merasa di sekitar pesisir kota Surabaya tidak pernah merasa dirugikan oleh pengusaha Teluk Lamong tersebut.

Bapak Jayanto merupakan warga Tambak Osowilangun merasa kecewa dan dirugikan oleh PT. Pelindo III. Dengan cara tidak halal tersebut yaitu melakukan kecurangan terhadap warga Tambak Osowilangun dengan bentuk perampasan tanah di gali dan air PDAM warga yang disalurkan ke Teluk Lamong. Investor mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tapi masyarakat merasa resah dan terhambat karena minimnya air PDAM tersebut.

Dari hasil temuan, kaum kapitalis melakukan kecurangan terhadap pemilik lahan atau tambak yang bersebelahan dengan pesisir. Bahwa harga jual beli itu tidak sebanding dengan luas tanahnya, kemudian kaum kapital melakukan penggalian tanah di jalan raya Tambak Osowilangun dengan tujuan supaya Teluk Lamong dengan cepat memperoleh air PDAM yang sudah di salurkan dengan PDAM masyarakat setempat, ini merupakan dampak negatif karena dampat menghambat aktivitas masyarakat untuk memperoleh air yang bersih sehingga kaum borjuis merasa dirugikan. Pemilik modal melanggar kesepakatan akan memprioritaskan masyarakat Tambak Osowilangun menjadi karyawan, tetapi salah satu warga yang merasakan kekecewaannya tidak dapat bekerja di tempat usahanya dikarenakan

tidak diterima dengan alasan belum dibutuhkan karyawan. Dengan demikian masyarakat merasa kecewa dan dirugikan. Jadi, secara tidak langsung PT. Pelindo III melanggar kesepakatan warga bersama dan tidak menghiraukan aturan-aturan yang ada di Tambak Osowilangun sejak dulu.

c. Kerusakan Tanah

Penggalian Teluk Lamong dapat berakibat pengikisan tanah dan menjadi berkurang. Meskipun masih bisa digunakan untuk bertani tetapi hasilnya tidak akan maksimal, karena unsur hara yang tergantung dalam tanah sudah hilang akibat dari penggalian tersebut. Dampak negatif dari penggalian Teluk Lamong adalah jika tanah terus-terusan digali maka akan mempengaruhi kekeroposan tanah yang ada disekitar lokasi penggalian tersebut, akibatnya wilayah sekitar lokasi penggalian tersebut akan menjadi rawan banjir dan ambruk. Rusaknya sistem dasar pantai dan biota laut menjadi punah, habitat kerang, udang, kepiting, terdamparnya ikan hiu tultul dan tercemarnya limbah kulit kerang di pantai kenjeran. sudah tidak bisa didapatkan lagi karena dampak dari pembangunan pelabuhan Teluk Lamong. Masyarakat merasa kecewa karena penghasilannya semakin merosot yang mulanya warga mendapatkan sempiyeng 5 kg terkadang ikan payus 4 kg, sekarang hanya dapat simpiyeng 2 kg ikan payus 2 kg. Karena kerusakan tanah akibat penggalian pasir di pesisir kota Surabaya, masyarakat mengeluh, rugi yang aslinya mendapatkan penghasilan uang sebesar Rp.200.000 itupun masih uang kotor belum dipotong dengan uang beli solar sebesar Rp. 100.000 dan bayar utang dan sisanya untuk kebutuhan lain-lain. Tapi adakalanya para pelajar se-Surabaya yang melakukan aksinya yaitu turutserta membersihkan pantai Kenjeran. Sedangkan dampak sosial yang terjadi akibat kerusakan tanah akan mengakibatkan gangguan jaringan jalan lintas dan kereta api di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Genangan air yang mengakibatkan banjir rob menjadikan hilangnya halan-lahan budidaya baik tambak bandeng, tambak udang dan tambak garam para nelayan sehingga mengalami penurunan produktifitas lahan pada sentra-sentra pangan bagi kelangsungan swasembada pangan di Surabaya.

Penghasilan tambak bandeng dan tambak garam yang setiap tahunnya rugi karena dampak banjir rob akibat proyek pengerukan pasir di laut Rumokalisari, laut Tambak Osowilangun, laut Branjangan, laut Kalianak dan laut kenjeran masih belum bisa meminimalisir dengan baik. Sehingga para nelayan lokal seperti sekitar masyarakat pesisir Madura, Tuban, Jember dan lain-lain sudah tidak lagi mencari tangkapan hasil laut di teluk lamong Tambak Osowilangun.

Peneliti mencoba meminjam pandangan Karl Max bahwa konflik tidak lepas dengan masyarakat. Bahwa masyarakat terbagi tiga kelas : (1)

Borjuis yaitu kepentingan pemilik tanah dan kapital, (2) Borjuis kecil sebagai transisi dan Proletar yaitu petani kecil.⁶⁷

Dari hasil temuan ada gesekan antara kaum borjuis pemilik modal PT. Pelindo III dengan kaum borjuis kecil sebagai aparat kelurahan yang telah curang melakukan bentuk penyuapan berupa uang yang kemudian borjuis kecil sebagai lembaga kelurahan melakukan pengurangan uang kompensasi yang diberikan oleh kapitalis kepada proletar. Dan kapitalis hanya bisa mengedepankan keuntungan dan menindas kaum proletar yaitu nelayan masyarakat sekitar akan merasakan dampak di pesisir kota Surabaya. Jadi, Kebijakan kaum kapitalis PT. Lapindo III tidak bisa mewujudkan nilai *green thought*, renaisas kota, dan keadilan dalam lingkungan yang telah rusak akibat akibat pengerukan pasir di pesisir kota Surabaya.

Hal tersebut senada dengan pendapatnya Martin (2010):

The somber trust that we have with our Creator (amana) to be stewards (khalifah) of the Earth means that we will be held accountable for our actions. These actions include those related to water. If the Earth is a mosque, then 70 percent of our mosque is water. Our mosque is oceans, streams, rivers, lakes, springs, and wells. It is our right to benefit from water; indeed, we need it for sheer survival. 68

Meminjam istilah *khalifah* menurut Martin diatas, fenomena masalah dampak lingkungan disekitar masyarakat nelayan atas beroprasinya proyek reklamasi Teluk Lamong di Surabaya. Menurutnya ada prinsip yang harus dipegang menjadi *khalifah* (penjaga) di bumi, menuntut investor untuk

⁶⁷ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam masyarakat Industri; Sebuah Analisa Kritik* (Jakarta : PT. Rajawali, 1986), 82

⁶⁸ *Ibid.*, 81.

bertanggung jawab atas segala tidakan yang di lakukan, termasuk segala tindakan kita berkaitan dengan air.

Dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana Ekowisata memerlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait diberbagai tingkat. Pemerintah harus lebih dominan, karena pemerintalah yang akan mengambil manfaat ganda dari pembangunan tersebut, seperti meningkatnya arus informasi, arus lalu lintasekonomi, arus mobilitasi manusia antar daerah, dan sebagainya, yang tentu saja dapat meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja masyarakat. Pembangunan prasarana reklamasi Teluk Lamong merupakan keharusan bagi perkembangan Ekowisata. Jalan dan jembatan yang baik memungkinkan wisatawan dengan mudah mencapai lokasi Ekowisata. Hal ini penting diperhatikan karena umumnya lokasi Ekowisata berbeda pada posisi yang agak sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat seperti bus dan minibus. Jadi kebijakan investor, pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kelurahan belum melakukan keadilan lingkungan dalam pemanfaatan lahan dan sumber adaya alam dapat diperbarui yang beretika, berimbang, dan bertangung jawab demi kepetingan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Maka, dengan adanya perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana maka perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pembangunan Teluk Lamong dan prasarana dasar yang sedang dibangun dengan cara memberikan informasi secara utuh dan diberi

pengetahuan tentang pentingnya dan keuntungan pengembangan Ekowisata, serta menjelaskan kerugian yang mungkin dialami jika tidak terlibat aktif.

B. Upaya pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dalam penyelamatan ruang hidup nelayan di pesisir Kota Surabaya

Green Thought menginginkan adanya perubahan di muka bumi, dengan cara menggebrak kepada Investor, pemuda-pemudi, nelayan, dan masyarakat di pesisir kota Surabayasupaya meningkatkan kepeduliannya terhdap lingkungannya. Sehingga nantinya manusianya sendiri yang akan menikmati hidup dengan aman di masa depan dengan kondisi bumi yang tetap terjaga, oleh karena itu unsur manusia sendiri sangat dibutuhkan mengingat sangat terdapat erat kaitannya hubungan antara manusia dengan lingkungan. Disini peran etika lingkungan sangat perlu agar manusia dalam menjalankan hubungan timbal balik dengan alam lebih berhati-hati dalam bertindak untuk tidak semena-mena terhadap lingkungan.

Untuk mewujudkan renaisans kota Surabaya, KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisioanal Indonesia) berinisiatif mengadakan lomba kampung hijau di sekitar pesisir kota Surabaya. Yaitu Gerakan inisiatif hijau (*green intiatives*) yang berkembang pesat di Surabaya, ditandai dengan pertumbuhan kampung hijau, bangunan hijau, properti hijau, dan komunitas hijau. Provinsi Kota Surabaya harus didorong untuk lebih bersungguh-sungguh (berkomitmen dan konsisten) membangun kota yang ramah lingkungan (*eviromentally progressive cities*), dibuktikan dalam prioritas anggaran dan kegiatan pembangunan kota yang ramah lingkungan (*green development*).

KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) juga melakukan pengembangan infrastruktur intelektual (intetectual infrastructure) dengan mendorong peran proaktif lembaga pendidikan (proactive educational institusions) memberikan solusi-solusi nyata dalam mengatasi permasalahan kota, terutama banjir dan kemacetan secara tuntas dan menyeluruh. Ketersediaan lapangan kerja dan jaminan keselamatan memberikan kepastian penghasilan (affordability) untuk memenuhi seluruh biaya kehidupan secara mewadai (appropriate cost of living for all walks of life) dalam kerangka menuju masyarakat kota yang sejahterah. Perkembangan perekonomian kota juga harus diarahkan menuju pertumbuhan ekonomi hijau (green economy growth, green industry).

Dari hasil temuan, peneliti menemukan upaya yang sudah di lakukan oleh KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dalam penyelamatan ruang hidup nelayan di pesisir kota Surabaya, antara lain:

- a. KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) meminta pemerintah harus bergotong royong untuk memenuhi hak-hak dasar nelayan dalam proses tanggap darurat bencana, dan segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana terhadap sumbersumber penghidupan nelayan tradisional sebagaimana dimanatkan oleh undang-undang penangulangan bencana.
- b. Langkah KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dalam memperkuat perekonomian nelayan, KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) mempunyai inisiatif membentuk koperasi

nelayan sebagai soko guru semua unit usaha perikanan tangkap, perikanan yang mempunyai nilai tambah paling besar akan di kelola berbasis koperasi.

- c. Berperan aktif dalam membangun penguatan kemandirian ekonomi nelayan Nelayan dan Pembudidaya ikan.
- d. Mengadakan dialog Publik tentang ketangguhan nelayan terhadap dampak perubahan iklim
- e. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak.
- f. Membangun penguatan kemandirian ekonomi nelayan perempuan dan Pembudidaya ikan.
- g. Merekrut nelayan dengan membuka UKM Jurnalistik, diadakan lomba desain penataan pesisir.

KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat luar dalam pelestarian lingkungan, dalam upaya melestarikan lingkungan, tidak hanya di ranah lokal keluran saja, tetapi mereka ikut serta dalam peguyuban lingkungan dimana mereka dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkena dampak agar, merubah perilaku mereka lebih ramah lingkungan. Upaya ini merupakaan bentuk sosialisasi masyarakat nelayan di pesisir kota Surabaya untuk memperhatikan kebersiahan dan melestarikan lingkungan di tempat tinggalnya. Masyarakat ikut aktif juga dalam upaya tersebut dan saat ini tergabung dalam komunitas KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Dengan demikian, peneliti akan mengimplikasikan dalam pencapaian *green thought* di pesisir Kota Surabaya diantaranya :

1. Bidang sosial budaya

Perubahan yang terjadi di wilayah pesisir kota Surabaya mengawal pada perubahan moral terhadap perilaku ramah lingkungan. Kehidupan sosial yang awalnya agraris menjadi industriais, Wilayah pesisir merupakan wilayah yang potensial, namun pemanfaatan saat mengancam kapasitas berkelanjutan (sustainable capacity) dari ekosistem tersebut, dan dapat mempengaruhi perubahan kesadaran mereka. Pertama, perubahan kehidupan sosial dibuktikan dengan adanya kerjasama masyarakat di pesisir kota Surabaya untuk merubah kondisi lingkungannya dalam hal ini terjadi penguatan partisispasi masyarakat nelayan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Melalui penyuluhan sosialisasi, musyawaruh antar RT setiap sebulan sekali mereka membicarakan arah untuk berkelanjutan pengelolahan kampung agar terdapat upaya pelestarian lingkungan.

Kedua, perubahan budaya dapat dilihat dari kesadraan masyarakat akan pentingnya lingkungan dan melestarikan dengan upaya mereka terhadap hasil pengelolahan sampah dan menghemat air. Budaya yang sebelumnya kumuh, tidak terjaga kebersihan serta pelestarian lingkungan berbuah menjadi budaya yang berpegang pada hidup ramah lingkungan.

2 Politik

Saat ini kota-kota besar memusatkan perhatiannya dalam upaya pelestarian lingkungan salah satunya mengembangkan *green thought* dan

komunitas hijau (green community), selain itu penyediaan, infrastruktur hijau, transportasi hijau bangunan hijau seperti taman bibit, lomba desain penghijauan antar kampung dan lain-lain. Gerakan yang dilakukan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dalam hal ini memberikan dampak positif terhadap green thought yaitu upaya penyelamatan ruang hidup para nelayan. Selain itu, keterlibatan masyarakat di pesisir kota Suarabaya dalam paguyuban lingkungan akan memperluas jaringan gerakan pelestarian lingkungan di kampung kota lainnya. Masyarakat lebih aktif di rekrut menjadi kader lingkungan untuk mensosialisasikan pengelolahan lingkungan ke masyarakat lain. Selain itu KNTI (Kesatuan Nelayan tradisional Indonesia) akan melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha penggalian pasir di Tambak Osowilangun akan tetapi pemkot Surabaya tidak ada bentuk pertangungjawaban terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Dalam hal ini inovasi yang dilakukan masyarakat di pesisir kota Surabaya memberikan pengaruh yaitu memunculkan citra positif kota Surabaya yang ramah lingkungan dengan menempatkan partisipasi masyrakat untuk melestarikan lingkungan kotanya.

3. Ekonomi

Aksi kolektif di pesisir kota Surabaya khususnya di Kenjeran membawa dampak pada perubahan ekonomi masyarakat sekitarnya. Dengan menjadikan kampung mereka sebagai kampung wisata, banyak kunjungan wisata lingkungan untuk belajar pelestarian lingkungan. Hal ini kemudian membawa dampak bagi perekonomian masyarakat sekitarnya yaitu wisatawan datang

dipantai kenjeran dengan menyewa prahu, membeli oleh-oleh di SIB (Sentra Ikan Bulak) Kenjeran. Selain itu, pada pengelolahan sampah yang dikumpulkan dalam setiap bulannya mereka dapat memperoleh penghasilan dari hasil sampah serta kerajinan yang dapat dijual kembali.

Dengan demikian, KNTI (Kesatuan Nelayan tradisional Indonesia) sudah melakukan upaya pendampingan khusus terhadap kaum proletar petani, nelayan perempuan dan masyarakat terdampak berupa penguatan perekonomian nelayan pesisir kota surabaya, mengadakan koprasi nelayan.

4. Lingkungan

Upaya pelestarian lingkungan di pesisir kota Surabaya dimana berbasiskan pada masyarakat dalam hal ini memberikan pengaruh positif bagi berkelanjutan lingkungan di perkotaan. Inisiatif untuk melestarikan lingkungan di wilayah lokal tempat tinggal masyarakat terkena dampak mulai mendapat perhatian KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dengan diturunkannya melakukan tanggap darurat di saat nelayan terkena bencana banjir, membentuk perekonomian "koperasi Nelayan" Soko guru unit usaha berupa perikanan tangkap dan pembudidaya lahan. Membangun penguatan kemandirian ekonomi nelayan perempuan dan Pembudidaya ikan. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak. Mengadakan sosialisasi dialog Publik tentang ketangguhan nelayan terhadap dampak perubahan iklim. Merekrut nelayan dengan membuka UKM Jurnalistik sehingga mengetahui informasi dari para nelayan, diadakan lomba desain penataan pesisir, kegiatan ini bersifat mengajak kepada masyarakat

untuk lebih memperhatikan ramah lingkungan terutama pada kebersihan kampung dengan cara memberikan penyuluhan mengenai memilahan sampah dan penghijauan kampung di pesisir pantai kota Surabaya. KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) akan tetap melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pembangunan proyek tersebut. Selain itu akan memperkuat UKM lainnya yakni penguatan jurnalistik nelayan bertujuan supaya KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) mengetahui informasi lebih mendalam sejauhmana nelayan memperhatikan lingkungannya dan akan mengetahui keluhan-keluhan nelayan dipesisir kota Surabaya, serta melakukan dialog Publik tentang ketangguhan nelayan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu berupaya melakukan lomba desain kampung di pesisir sehingga para nelayan juga memperhatikan kebersihan kampung pesisir, nelayan perempuan melakuan pembersihan sampah-sampah kemudian di pisah antara sampah organik dan non organik selanjutnya di berikan ke Bank Sampah supaya masyarakat tetap mendapatkan hasil lebih dari penjualan sampah tersebut, selain itu yang lebih banyak adalah masyarakat menjual hasil nelayannya di SIB (Sentra Ikan Bulak) berbagai kerajinan kulit kerang dimanfaatkan untuk hiasan rumah dan berbagai aneka kuliner lainnya.

Senada dengan pendapat Matin (2010), ia mendorong pada manusia untuk menjadi makhluq yang berimbang diantaranya menjaga keseimbangan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Menurut dia, Pembangunan yang berlebihan, ia dipicu oleh perilaku konsumtif yang berlebihan (*which had*

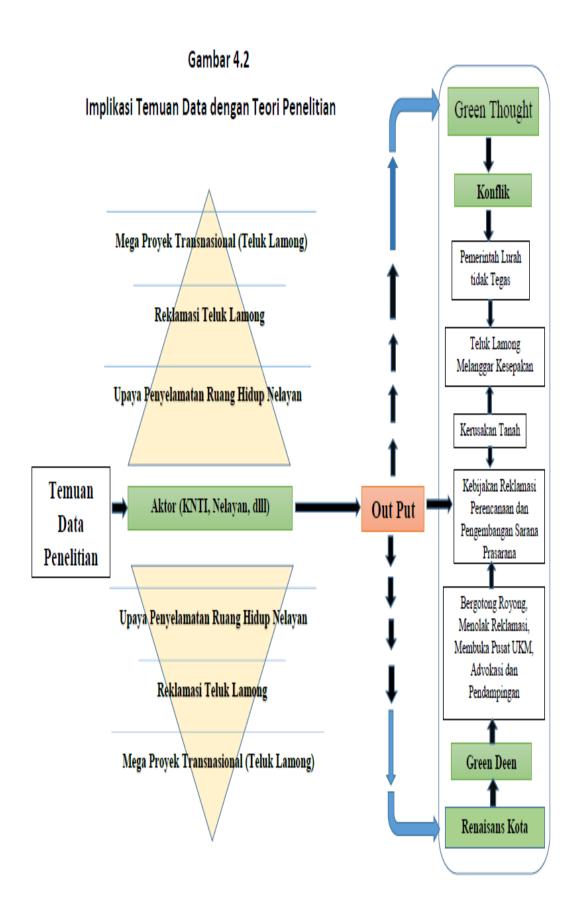
negatively affected the balance that God made in nature. This overdevelopment was fueled by overconsumption). ⁶⁹ Sederhananya, makhluk yang berimbang harus menjalankan prinsip kegotong-royongan dan memonitoring berjalannya pembangunan, seperti pembanguan pelabuhan Teluk Lamong.

Penguatan ekonomi pada nelayan meminjam istilah Matin (2010), ia menyebutnya "In response, large industrial cities, not immuneto the negative effects of development, started to make conservation a priority". ⁷⁰ Artinya, untuk mengatasi dampak negatif pembangunan, konsep konservasi bisa menjadi prioritas utama oleh masyarakat nelayan pesisir kota Surabaya termasuk didalamnya melakukan advokasi dan pemberdayaan pada nelayan.

Untuk lebih jelasnya terkait temuan data dengan implikasi teori penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2 Implikasi Teori dibawah ini :

104

⁶⁹ Ibrahim Abdul Matin, *Green Deen*. (Sanfrasisco California: Berrett-Koehler Publishers, Inc.) h. 39



Dari keterangan gambar 4.2 tentang gambar implikasi teori terkait dengan membangun proyek reklamasi dalam ramah lingkungan ialah ketika masyarakat dapat *memanagement* atau mengatur masalah sosial dengan baik, kebutuhan akan terpenuhi dan adanya peluang sosial maka masyarakat mengalami sejahterah tanpa resiko lingkungan, keberfungsian sosial yang efektif, dan kemudahan dalam berfungsi.

Maksud dari sejahterah tanpa resiko ialah masyarakat nelayan pesisir kota Surabaya dan masyarakat pendatang dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bisa dikatakan sejahterah tanpa resiko. Selanjutnya keberfungsian sosial efektif, pada kondisi ini masyarakat nelayan di pesisir kota Surabaya dan masyarakat pendatang telah mengalami sejahteran tanpa resiko, maka akan mengalami keberfungsian sosial yang efektif sehingga akan mengalami kemudahan dalam berfungsi lingkungan dan sosial, karena merasa bercukupan dalam hal ekonomi. Sehingga, masyarakat nelayan di pesisir kota Surabaya dan masyarakat pendatang mengalami kesejahteraan ekonomi dengan cara membikin ekowisata disekitar Teluk Lamong.